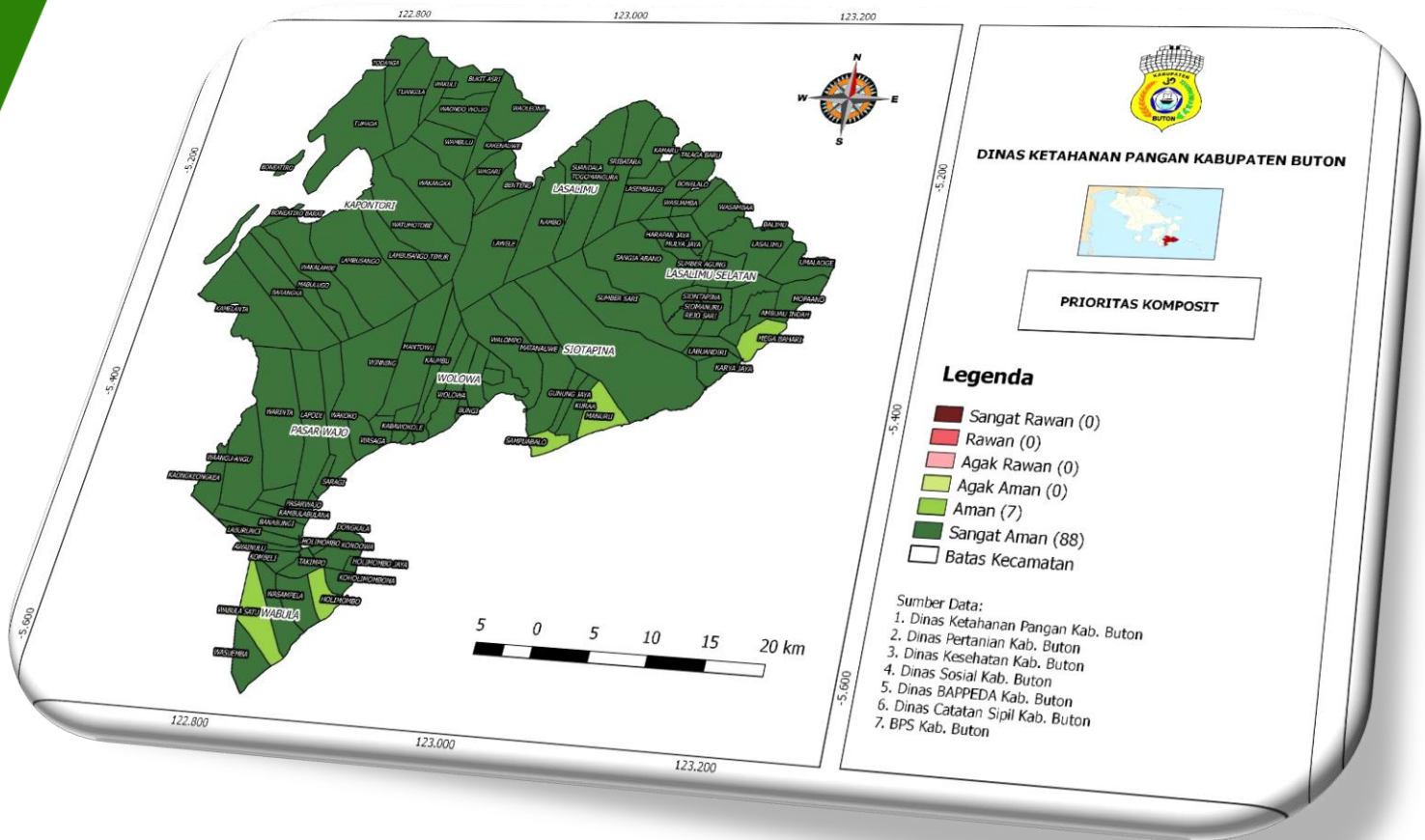


PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS - FSVA*) KABUPATEN BUTON TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS KETAHANAN PANGAN



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWEI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TA.2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Buton;
- b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Buton dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dibidang pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buton tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal November 2024

Pj. BUPATI BUTON,

LA HARUNA, S.P., M.Si.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra,
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton; dan
6. Kepala Dinas SKPD terkait Kabupaten Buton,



BUPATI BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SAMBUTAN



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita terus berkarya dalam segala tindakan nyata untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Buton yang kita cintai bersama ini kearah yang lebih baik disegala sektor pembangunan khususnya dalam upaya peningkatan sektor ketahanan pangan. Berbagai pemikiran dan upaya pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan ketahanan pangan disegala tingkatan, baik dilevel Kabupaten, Kecamatan maupun dilevel tingkat desa/kelurahan untuk memberikan kontribusi yang besar sebagai upaya menjadikan masyarakat Kabupaten Buton yang lebih sejahtera.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan Pangan selalu menjadi isu strategis karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga Negara yang harus di jamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat cerdas, aktif dan produktif. Hal ini mengingat pangan tersebut, belum tentu sepenuhnya dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh keiompok masyarakat.

Pada era globalisasi yang serba terbuka seperti sekarang ini, pengaruh perkembangan global sangat berpotensi menentukan status ketahanan pangan baik ditingkat internasional, nasional, regional bahkan sampai dengan ketahanan pangan tingkat perseorangan.

Untuk itu saya tetap berharap kita semua selalu memberikan perhatian serius dan secara bersama-sama untuk terus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas dan bekerja dengan ikhlas untuk menjadikan Kabupaten Buton lebih baik pada masa mendatang demi kesejahteraan masyarakat kita. Dan Buku Peta FSVA di tingkat kabupaten buton selaiu di mutakhirkan agar dapat di gunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan dan dasar penetapan locus dan program intervensi pengentasan daerah rentan rawan pangan.

Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi di bentuknya buku peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) tahun 2024 yang menggambarkan pangan serta karakteristik wilayah rentan rawan pangan sampai dengan level desa/kelurahan.

Semoga buku peta FSVA ini dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam melakukan senergi program pengentasan daerah rentan rawan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah, Hal ini penting dalam mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan stunting serta untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh wilayah Indonesia.

Wabillahitaufik walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasarwajo, November 2024


PJ BUPATI BUTON,
LA HARUNA, S.P., M.Si.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan ijin dan ridho-Nya, penyusunan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) Kabupaten Buton tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik, dimana secara resmi telah di luncurkan (Publikasi) oleh Bupati Buton.

Publikasi FSVA Kabupaten Buton ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan yang bisa menyebabkan kerawanan pangan di Kabupaten Buton, dimana pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga apabila dalam penanganannya dapat dilakukan dengan baik dan benar serta tepat waktu dan tepat sasaran diharapkan dapat menekan berbagai faktor pemicu kerawanan pangan.

Ketahanan Pangan selalu menjadi isu strategis, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga Negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya. Pemenuhan kecukupan pangan dan gizi merupakan prasyarat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif.

Pemetaan dilakukan sampai tingkat desa agar penanganan permasalahan dan tantangan yang menyebabkan terjadinya masalah pangan, dapat dilakukan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Dengan FSVA pemantauan dini dapat lebih ditingkatkan agar kejadian rawan pangan dapat dideteksi lebih dini.

Buku dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) yang telah disusun ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, khususnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton sebagai pengambil kebijakan untuk menyusun program kegiatan di desa/kelurahan yang paling mendesak berdasarkan skala prioritas yang telah digambarkan didalamnya.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Kabupaten Buton tahun 2024 yang telah disusun ini, mencakup 7 Kecamatan dan 95 Desa/Kelurahan yang merupakan hasil konsolidasi dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu : 1. Aspek ketersediaan pangan, 2. Aspek akses pangan, 3. Aspek pemanfaatan pangan dengan 6 indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan FSVA Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penyusunan FSVA Kabupaten Buton dimasa-masa yang akan datang. Kami berharap dengan diluncurkannya Buku dan PETA ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan khususnya disektor pembangunan ketahanan pangan di Daerah Kabupaten Buton.



Kepala Dinas

LA LODI, S.Pt, M.Si

NIP. 19740823 200604 1 017

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisas geografis dari hasil analisa data indicator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indicator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
2. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.
3. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; dan (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; dan (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; dan (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
4. Peta FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (1) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan, (2) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (3) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan

- wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA Kabupaten Buton secara komposit dari 95 desa/kelurahan berada pada prioritas 5 (tahan pangan) dan prioritas 6 (sangat tahan pangan) yaitu prioritas 5 (tahan pangan) terdiri dari 7 desa/kelurahan sebesar (7,36%), sedangkan prioritas 6 (sangat tahan pangan) yaitu terdiri dari 88 desa/kelurahan sebesar (92,63%).
7. Hasil analisis FSVA Kab. Buton Tahun 2023 dari 95 desa/kelurahan berdasarkan prioritas individu / 6 indikator terdiri dari :
- Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk (indikator 1): prioritas 1 sebanyak 4 desa/kelurahan (4,21%), prioritas 5 sebanyak 26 desa/kelurahan (27,36%) dan prioritas 6 sebanyak 65 desa/kelurahan (68,42%)
 - Rasio jumlah sarana dan prasarana terhadap jumlah rumah tangga (indikator 2): prioritas 3 sebanyak 3 desa/kelurahan (3,15%), prioritas 4 sebanyak 16 desa/kelurahan (16,84%), prioritas 5 sebanyak 47 desa/kelurahan (49,47%) dan prioritas 6 sebanyak 29 desa/kelurahan (30,52%).
 - Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk (indikator 3) : prioritas 2 sebanyak 3 desa/kelurahan (3,15%), prioritas 3 sebanyak 16 desa/kelurahan (16,84%), prioritas 4 sebanyak 47 desa/kelurahan (49,47%), prioritas 5 sebanyak 25 desa/kelurahan (26,31%) dan prioritas 6 sebanyak 4 desa/kelurahan (4,21%)
 - Desa/kelurahan berdasarkan akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara (indikator 4): yaitu akses penghubung dari semua desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Buton dapat dilalui sepanjang tahun (100%)
 - Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga (indikator 5): yaitu semua desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Buton terdapat pada prioritas 6 dari 95 desa/kelurahan (100%)
 - Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (indikator 6): yaitu semua desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Buton terdapat pada prioritas 6 dari 95 desa/kelurahan (100%).

8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten buton diarahkan pada kegiatan:
- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
 - b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
 - c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
 - d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
 - e. Penyediaan tenaga kesehatan.
 - f. Optimalisasi dalam peningkatan ketersediaan pangan bagi masyarakat
 - g. Optimalisasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
 - h. Mendorong Pengembangan dan pemanfaatan sarana transportasi terpadu ditingkat wilayah.
 - i. Intervensi Kesehatan ibu dan anak harus difokuskan pada anak balita dan ibu hami/Stuntingl.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN BUPATI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR GRAFIK	x
I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan gizi	3
1.3. Metodologi	7
II KETERSEDIAAN PANGAN	
2.1. Lahan Pertanian	11
2.2. Produksi Pangan	13
2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi	18
2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan.....	19
III AKSES PANGAN	
3.1. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga	21
3.2. Akses Penghubung.....	23
3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan.....	25
IV PEMANFAATAN PANGAN	
4.1. Akses Air Bersih.....	26
4.2. Akses Tenaga Kesehatan	27
4.3. Strategi Pemenuhan Pangan	31
V KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan.....	35
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan.....	37
VI REKOMENDASI KEBIJAKAN	

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	5
Gambar 2	13
Gambar 3	19
Gambar 4	23
Gambar 5	24
Gambar 6	27
Gambar 7	28
Gambar 8	36
Gambar 9	38

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.....	14
Grafik 2.....	15
Grafik 3.....	16
Grafik 4.....	17
Grafik 5.....	18
Grafik 6.....	30
Grafik 7.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Buton terdiri dari tujuh kecamatan dan 95 kel/desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 119.896 jiwa (CAPIL). Kabupaten Buton terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 5,3°-5,39° Lintang Selatan dan memanjang dari barat ke timur di antara 122,8°- 123,13° Lintang Selatan.

Kabupaten Buton di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakotobi, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton yang memiliki wilayah daratan seluas 1.648,04 km² atau 164.804 ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas 21.054,69 km. Secara klimatologis, Kabupaten Buton memiliki pola tipe curah hujan tipe c, yaitu daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun.(Kabupaten Dalam Angka, BPS).

Perekonomian Kabupaten Buton tergantung pada sektor Pertambangan dan Penggalian mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor ini tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 peranannya dari 39,89% naik menjadi 41,34% di Tahun 2023. Selain sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor yang mengalami kenaikan di tahun 2023 adalah sektor Perdagangan Besar dan Enceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yaitu dari 13,56% menjadi 13,78%. Selain itu sektor yang mengalami penurunan namun masih memberikan kontribusi tinggi terhadap PDRB Kabupaten Buton adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini mengalami penurunan yaitu dari 20,64% di tahun 2022 menjadi 20,34% di tahun 2023;

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) telah melakukan beberapa hal untuk pembangunan, namun Pemerintah perlu lebih berusaha untuk memperhatikan disektor pertambangan dan penggalian dalam hal ini berhubungan dengan lapangan pekerjaan yang tentunya akan menyentuh langsung pada tingkat ekonomi masyarakat. Data distribusi menurut sektor dapat di tunjukan pada tabel berikut :

Tabel.1.1. Data Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,03	20,17	20,35	20,64	20,34
2	Pertambangan dan Penggalian	39,46	38,76	37,67	39,89	41,34
3	Industri Pengolahan	2,45	2,48	2,52	2,50	2,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,39	0,42	0,42	0,37	0,37
6	Konstruksi	6,52	6,40	6,66	5,74	5,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	12,84	12,75	13,38	13,56	13,78
8	Transportasi dan Pergudangan	0,81	0,81	0,81	0,82	0,81
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12
10	Informasi dan Komunikasi	0,26	0,29	0,29	0,27	0,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,65	0,66	0,73	0,71	0,71
12	Real estat	0,50	0,50	0,49	0,46	0,44
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	9,45	9,69	9,51	8,20	8,03
15	Jasa Pendidikan	5,11	5,42	5,50	5,29	5,19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,88	0,92	0,83	0,77
17	Jasa lainnya	0,55	0,57	0,57	0,54	0,55

Sumber Data : PDRB Kabupaten Buton atas Dasar Harga Berlaku.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka

upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur kebarat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

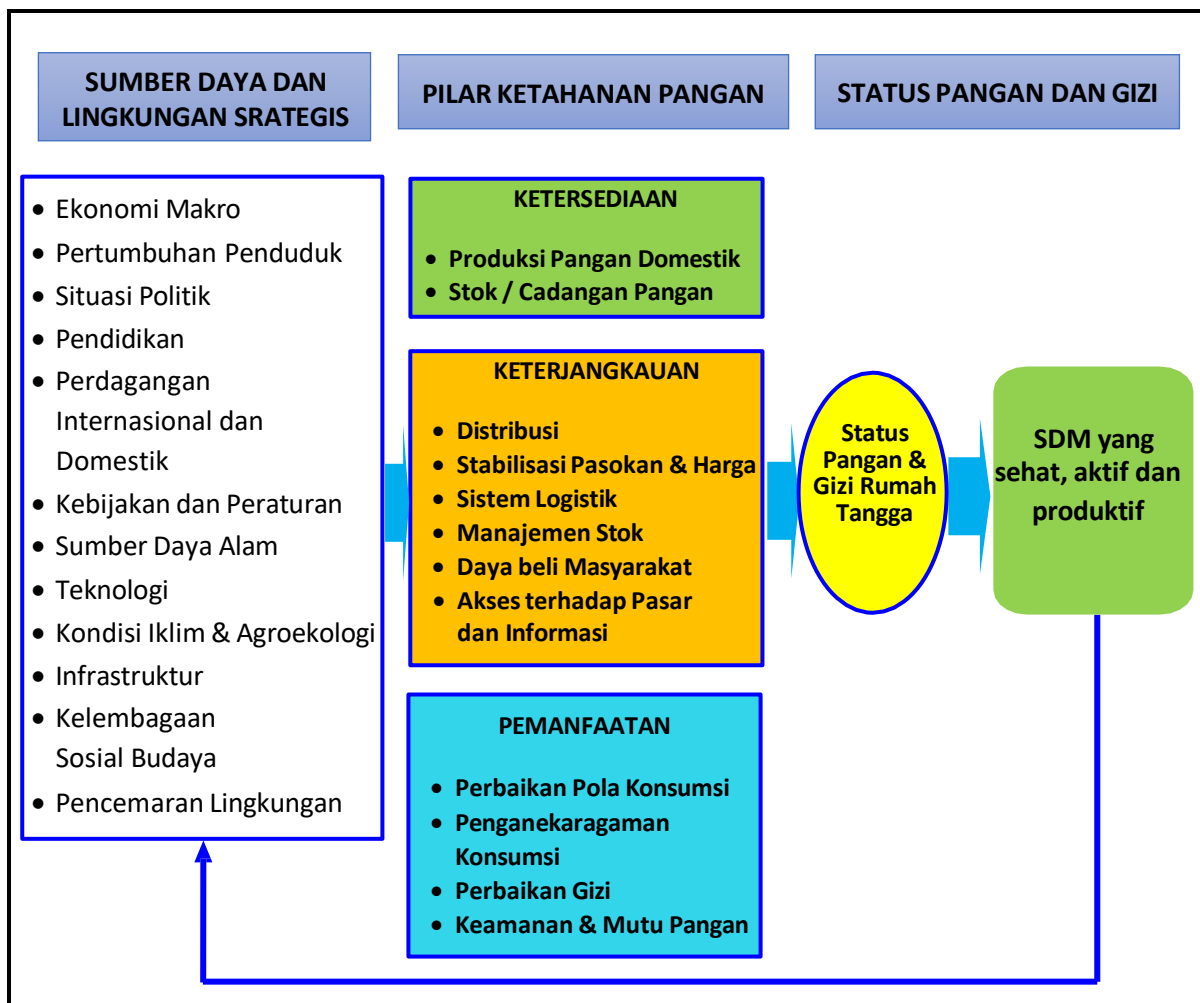
Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013 juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*).

Ketahanan Pangan berdasarkan Undang Undang nomor 18 Tahun 2012 merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi

Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan keamanan pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Pilar Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Pilar Akses atau keterjangkauan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantu pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pilar Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas. Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan. Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidak mampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi.

Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk konsumsi pangan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. METODOLOGI

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa. Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.2. Indikator FSVA Kabupaten 2024

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luaslahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk	BPS dan Dinas Pertanian
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa / kelurahan	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk Desa	Data PKH Dinas Sosial

Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria:(1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan Umum	Data BAPPEDA
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan BAPPEDA
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) PTT (5) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, sukarela, apoteker, nusantara sehat) dibandingkan jumlah penduduk desa/kelurahan.	Potensi Desa 2023 dan Dinas Kesehatan

Metode Analisis

a. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

b. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relative indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0–100)

Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indicator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indicator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.3. Bobot Indikator Individu

No.	Indikator	Bobot	
		Desa	Kelurahan
I.	Aspek Ketersediaan Pangan/Sub Total	1/3	1/3
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/6
II.	Aspek Pangan/Sub Total	1/3	1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa/kel	1/6	1/6
4.	Desa/Kel yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6	1/6
III.	Aspek Pemanfaatan Pangan/Sub Total	1/3	1/3
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa/kel	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa/kel	1/6	1/6
	Sub Total	1/3	1/3

Mengelompokkan sub total desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari pada kelurahan dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

c. Pemetaan

Hasil analisis komposit kemudian divisualisasikan ke dalam sebuah bentuk peta. Selain itu, indikator individu juga divisualisasikan ke dalam bentuk peta berdasarkan range indikatornya, sehingga akan dihasilkan tujuh peta yang terdiri dari satu peta komposit dan enam peta indikator individu. Peta- peta yang dihasilkan menggunakan gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gradasi hijau menggambarkan variasi ketahanan pangan. Warna yang semakin tua menunjukkan status yang lebih tinggi dari situasi ketahanan atau kerentanan pangan. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan software Quantum-GIS.

BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Buton berjumlah 4.931,54 hektar yang terdiri dari Kecamatan Lasalimu 19 Ha, Kecamatan Lasalimu Selatan 32 Ha, Kecamatan Siotapina 515 Ha, Kecamatan Pasarwajo 1.039,50 Ha, Kecamatan Wolowa 472,4 Ha, Kecamatan Wabula 97 Ha dan Kecamatan Kapontori 757 Ha.

Dari 95 desa/kelurahan di Kabupaten Buton, desa masuk dalam **prioritas 1 (sangat rentan) 4,21 %** yaitu 4 desa terdiri dari : Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu **Desa Balimu**, Kecamatan Siotapina yaitu **Desa Bahari Makmur**, Kecamatan Pasarwajo yaitu **Desa Dongkala** dan

Kecamatan Wabula yaitu **Desa Bajo Bahari. Prioritas 2** (rentan) dan **prioritas 3** (agak rentan) tidak terdapat Desa atau (0 %).

Prioritas 4 (agak tahan) tidak terdapat Desa atau (0 %), sedangkan **prioritas 5 (tahan)** 27,36 % yaitu 26 desa terdiri dari :

1. **Kecamatan Kapontori** yaitu Desa Barangka, Boneatiro, Boneatiro Barat, Kamelanta, Lambusang, dan Lambusango Timur;
2. **Kecamatan Lasalimu** yaitu Desa Nambo, Talaga Baru, Wagari dan Waoleona.
3. **Kecamatan Pasarwajo** yaitu Desa Banabungi, Kabawakole, Kancinaa, Kambulabulana, Kombeli, Pasarwajo, Wakoko, Kondowa dan Laburunci.
4. **Kecamatan Siotapina** yaitu Desa Kumbewaha, Manuru dan Sampoabalo.
5. **Kecamatan Wabula** yaitu Desa Wabula, Wabula satu dan Wasuemba.
6. **Kecamatan Wolowa** yaitu Desa Wolowa Baru.

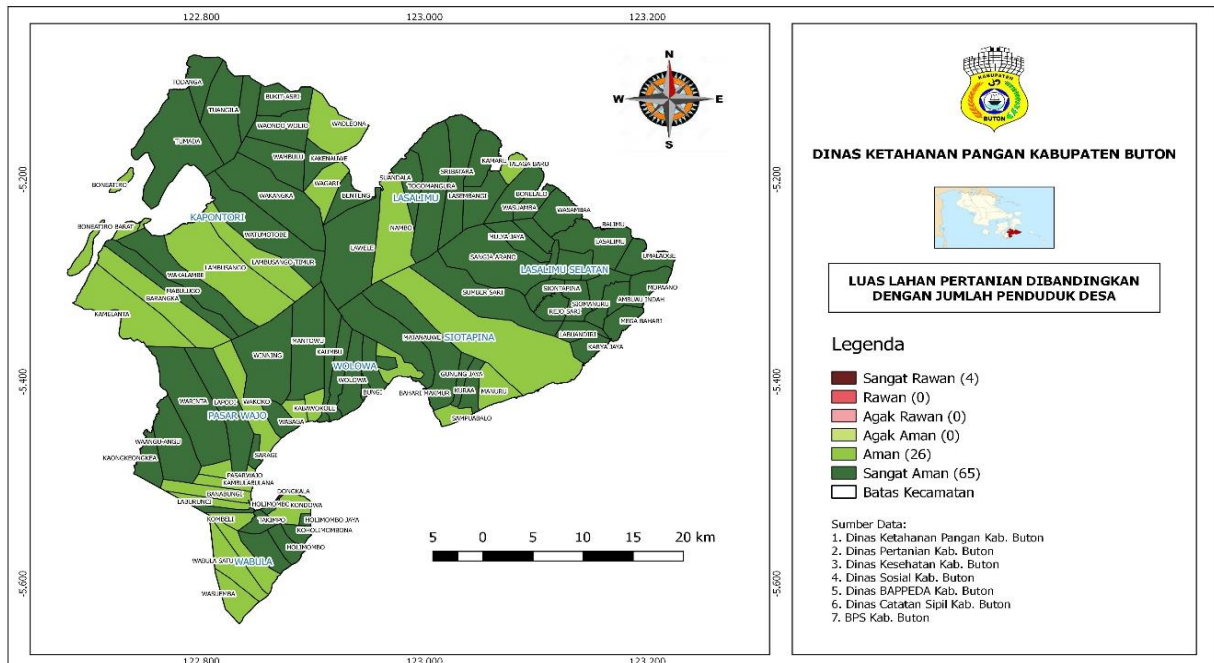
Prioritas 6 (sangat tahan) sebanyak 65 desa/kel atau (68,42%) berada diwilayah :

1. Kecamatan Kapontori yaitu 11 Desa
2. Kecamatan Lasalimu yaitu 14 Desa
3. Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu 15 Desa
4. Kecamatan Siotapina yaitu 6 Desa
5. Kecamatan Pasarwajo yaitu 12 Desa/Kelurahan
6. Kecamatan Wolowa 6 Desa
7. Kecamatan Wabula 3 Desa.

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik. Perbandingan rasio lahan pertanian tahun 2022 dengan tahun 2023 tidak mengalami banyak perubahan atau fleksibel.

Tabel 2.1 Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan/Desa	Persentase
1	Sangat Rentan	4	.4,21
2	Rentan	0	0
3	Agak Rentan	0	0
4	Agak Tahan	0	0
5	Tahan	26	27,36
6	Sangat Tahan	65	68,42



Gambar 2. Peta Luas Lahan Pertanian

2.2. PRODUKSI PANGAN

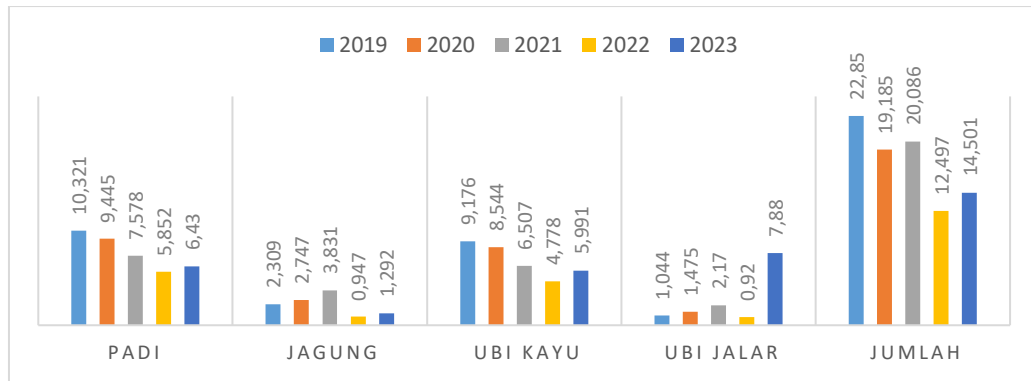
Pemerintah Kabupaten Buton telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) masih mempunyai peranan tertinggi yaitu sebesar 20,34% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buton di tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 2.2 dan Grafik 2.2, produksi umbi-umbian dan jagung di Kabupaten Buton mengalami peningkatan di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya luas tanam dan meningkatnya produktivitas.

Tabel 2.2 Produksi Serealial Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton)

SEREALIA	TAHUN					RATA-RATA 5 TAHUN
	2019	2020	2021	2022	2023	
Padi	10.321	9.445	7.578	5.852	6.43	7.925
Jagung	2.309	2.747	3.831	0.947	1.292	2.225
Ubi kayu	9.176	8.544	6.507	4.778	5.991	6.999
Ubi jalar	1.044	1.475	2.17	0.92	7.88	2.697
Jumlah	22.85	19.185	20.086	12.497	14.501	17.823

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tahun 2019-2023



Grafik 1. Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton)

Padi

Produksi padi mengalami penurunan setiap tahunnya. dimana pada tahun 2019 sebesar 10.231 ton, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9.445 ton. Pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami kembali penurunan sebesar 7.578 ton dan sebesar 5.852 ton. Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 6.430.

Terjadinya penurunan produksi padi di sebabkan antaran lain :

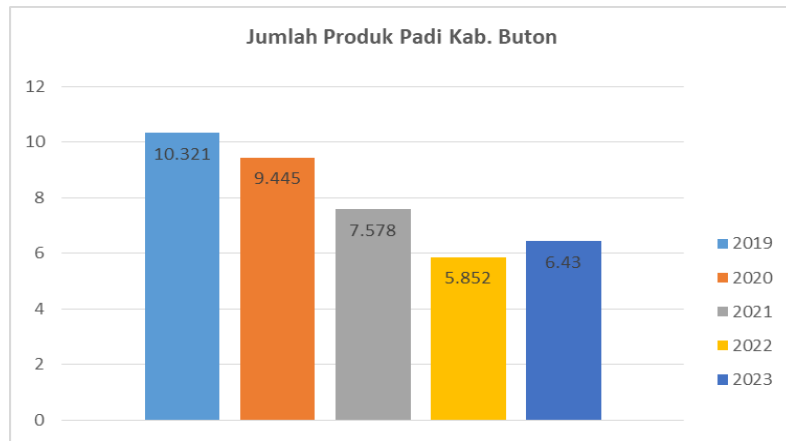
1. Perubahan iklim yang cukup panas mempengaruhi pertumbuhan padi baik sawah maupun ladang.
2. Masih adanya kerusakan jaringan irigasi di beberapa wilayah, sehingga belum mampu untuk menjamin ketersediaan sumber air terutama pada musim kemarau, dimana sebagian lahan sawah merupakan lahan sawah tadah hujan yang sumber airnya sangat tergantung pada curah hujan.
3. Berkurangnya perluasan lahan tanam di masyarakat.

Berikut ini penyajian produksi padi sebagai berikut :

Tabel 2.3 Produksi Padi 2018 – 2022 (Ton)

Kabupaten Buton	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Produksi Padi	10.321	9.445	7.578	5.852	6.43

Sumber: BPS/Dinas Pertanian



Grafik.2. Produksi Padi Tahun 2019-2023

Jagung

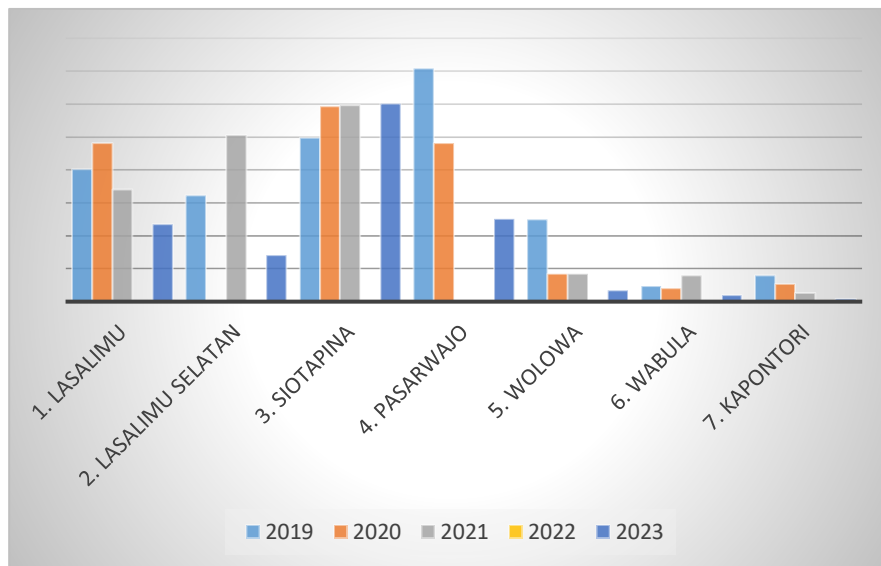
Untuk jagung varietas yang di tanam oleh petani lebih banyak varietas lokal yang mutu produksinya masih rendah, serta petani cenderung melakukan panen mudah karena dianggap memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi di banding dengan panen tua. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.746 ton.

Namun ditahun tahun berikutnya mengalami penurunan hingga tahun 2022 turun hanya 947 ton dan di tahun 2023 produksi jagung meningkat menjadi 1.292 ton. Hal ini sangat penting untuk menjadi perhatian bagi pihak pemerintah atau Dinas yang terkait. Secara rinci produksi jagung tahun 2019-2023 disajikan pada **Tabel 3.4**

Tabel 2.4 Produksi Jagung 2019 - 2023 (Ton)

Kecamatan	Jagung				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Lasalimu	402	481	341	192,18	235
2. Lasalimu Selatan	323	1.011	506	283,02	141
3. Siotapina	498	593	596	253,92	601
4. Pasarwajo	708	481	1.033	256,19	252
5. Wolowa	249	85	85	41,81	35
6. Wabula	48	41	80	17,07	20
7. Kapontori	80	54	26	3,25	9
Jumlah	2.308	2.746	2.666	947	1.292

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Buton 2019-2023



Grafik.3. Produksi Jagung 2019 – 2023 (Ton)

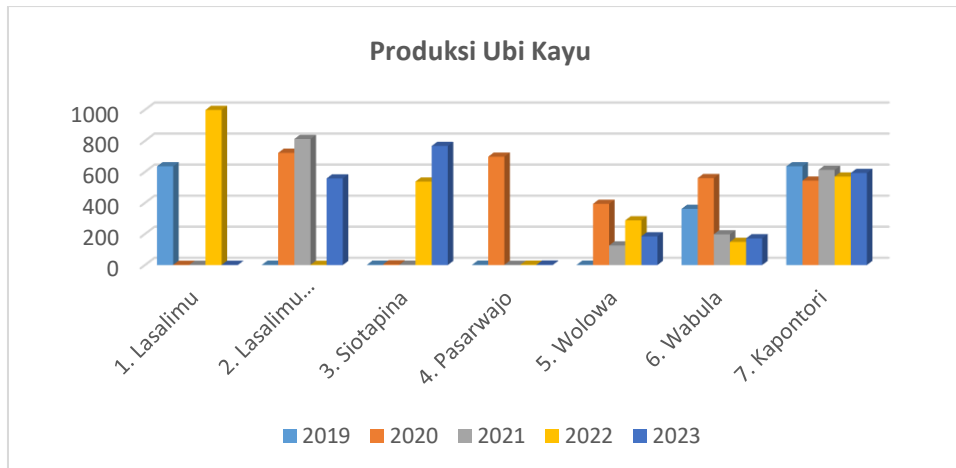
Ubi Kayu

Produksi ubi kayu menurun dari 9.177 ton pada tahun 2019 menjadi 4.778 ton pada tahun 2022 dan di tahun 2023 produksi ubi kayu naik menjadi 5.791. Berikut produksi ubi kayu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel.2.5 Poduksi Ubi Kayu 2019-2023 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Lasalimu	636	1.366	1.436	999	1.006
2. Lasalimu Selatan	1.719	723	812	1.148	558
3. Siotapina	2.007	4.262	1.746	538	767
4. Pasarwajo	1.711	698	1.657	2.086	2.509
5. Wolowa	2.106	394	126	288	185
6. Wabula	362	560	198	149	172
7. Kapontori	636	544	613	570	593
Jumlah	9.177	8.547	6.507	4.778	5.791

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Buton



Grafik.4. Poduksi Ubi Kayu 2019-2023 (Ton)

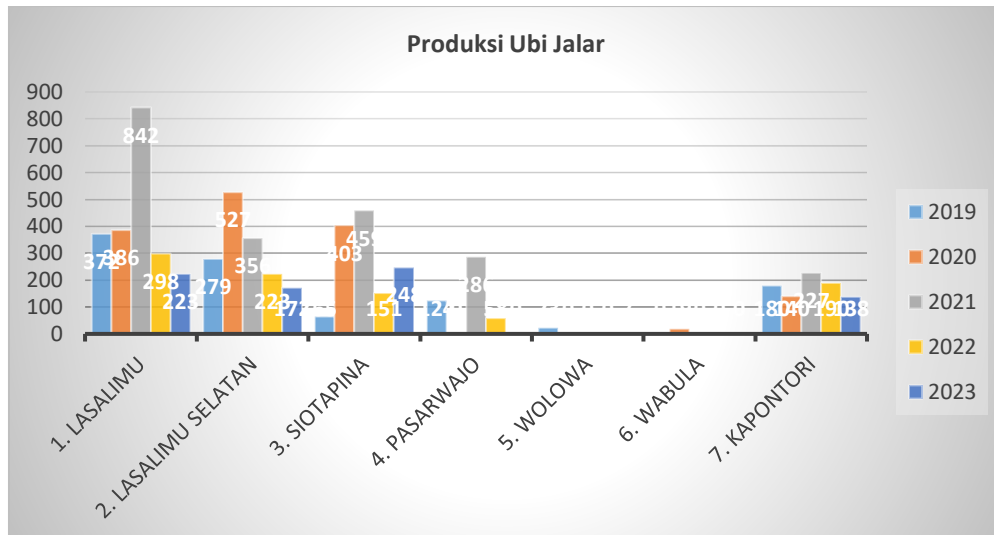
Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2019 - 2023) terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 7.88 ton namun sampai pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 788 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2019 - 2023 disajikan pada **Tabel 3.6**.

Tabel.2.6 Poduksi Ubi Jalar 2019-2023 (Ton)

Kecamatan	Ubi Jalar				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Lasalimu	372	386	842	298	223
2. Lasalimu Selatan	279	527	356	223	172
3. Siotapina	65	403	459	151	248
4. Pasarwajo	124	-	286	58	-
5. Wolowa	23	-	-	-	7
6. Wabula	-	19	-	-	-
7. Kapontori	180	140	227	190	138
Jumlah	1.043	1.475	2.17	920	788

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Buton



Grafik.5. Poduksi Ubi Jalar 2019-2023 (Ton)

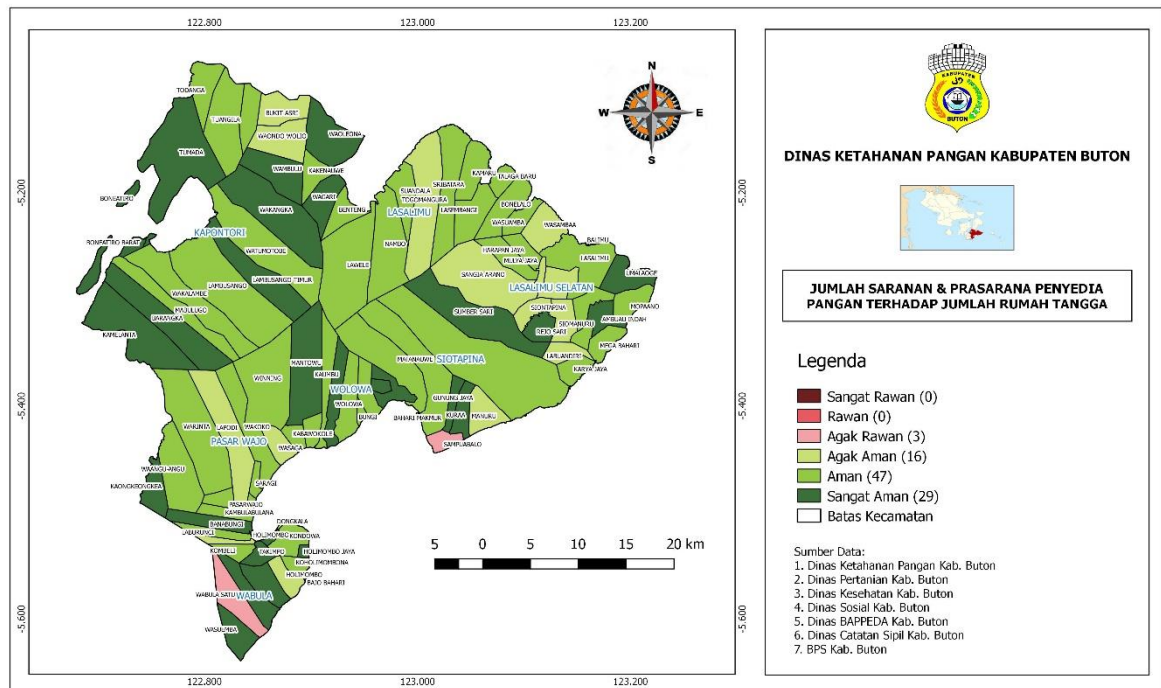
2.3. SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 95 Desa/Kelurahan di Kabupaten Buton, yang masuk dalam prioritas 1 dan prioritas 2 yaitu tidak ada desa (0 %), dan prioritas 3 yaitu ada 3 desa (3.15 %). Prioritas 4 ada 16 desa (16,84%), prioritas 5 yaitu ada 47 desa (49,47%), dan prioritas 6 yaitu ada 29 desa (30.52 %). Berikut dapat dilihat pada **Tabel 2.8**.

Tabel 2.8 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan/Desa	Persentase
1	Sangat Rawan	0	0
2	Rawan	0	0
3	Agak Rawan	3	3.15
4	Agak Aman	16	16,84
5	Aman	47	49,47
6	Sangat Aman	29	30,52



Gambar 3. Peta Sarana Dan Prasarana

2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buton mengenai ketersediaan pangan pada periode ke 2 (dua) 2018 – 2022 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani.

Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan produktivitas
 - a. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
 - b. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
 - c. Pengelolaan air
 - d. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
- Perluasan lahan sawah
 - a. Pengembangan lahan sawah
 - b. Optimalisasi penggunaan lahan
 - c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
 - d. Pembangunan sumur pompa dan dam/embung

- Pengurangan dampak iklim terkait resiko
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen
- Penguatan kelembagaan bagi petani
 - a. Lembaga Mandiri dan mengakar pada masyarakat
 - b. Pemasaran produk pertanian, dll
- Penguatan Kapasitas kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) :
 - a. Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
 - b. Pelaksanaan Rembuk Tani desa
 - c. Pelaksanaan kegiatan demplot penyuluh

BAB III

AKSES PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) Akses ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) Akses fisik: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) Akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial.

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1. TINGKAT KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Buton. Persentase penduduk miskin Kabupaten Buton sejak tahun 2019 yaitu 13,65% selalu meningkat hingga tahun 2022 mejadi 18,03%. Namun di tahun 2023 persentase penduduk miskin menurun menjadi 13,77%.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk miskin	13,65	13,21	13,92	18,03	13,77

Sumber: Dinas Sosial Kab. Buton

Pada tingkat desa berdasarkan Data Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023 terdapat 95 desa/kelurahan yang memiliki rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah yaitu sebagai berikut :

Prioritas 1 (sangat rentan) atau (0 %), **prioritas 2** (rentan) ada 3 desa atau (3,15%) yaitu di Kecamatan Pasarwajo (**Desa Holimombo Jaya**), Kecamatan Wabula (**Desa Wabula**) dan Kecamatan Wolowa (**Desa Suka Maju**). **Prioritas 3** (agak rentan) ada 16 desa atau (16,84%) yaitu Kecamatan Kapontori (**Desa Bukit Asri dan Desa Wakuli**), Kecamatan Lasalimu (**Desa Bonelalo dan Desa Wasambaa**), Kecamatan Lasalimu Selatan (**Desa Megabahari, Desa**

Sumber Agung dan Desa Umalaoge), Kecamatan Siotapina (Desa Gunung jaya, Desa Labuandiri, Desa Sampuabalo, Desa Summersari dan Desa Walompo), Kecamatan Wabula (Desa Holimombo, Desa Wabula Satu dan Desa Wasampela), dan Kecamatan Wolowa (Desa Bungi).

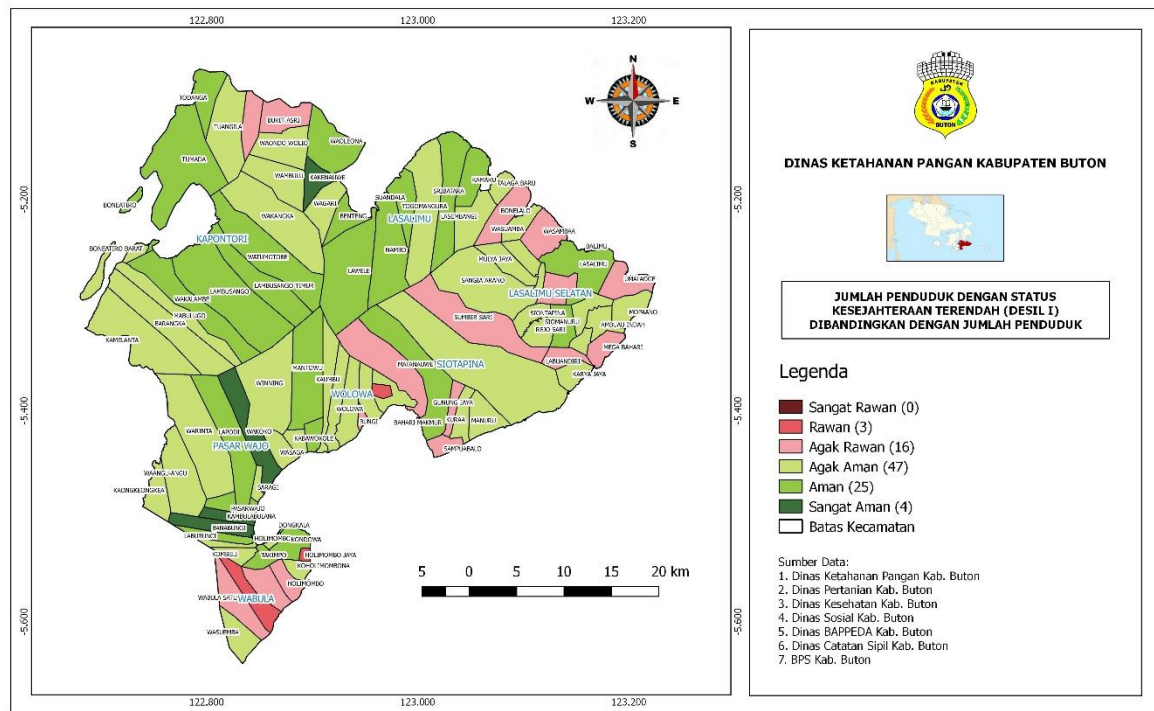
Prioritas 4 (Agak Tahan) ada 47 Desa atau (49,47%) yaitu Kecamatan Kapontori (**Desa Barangka, Boneatiro Barat, Kamelanta, Wakangka, Mabulugo, Tuangila, Wambulu, dan Waondowolio**), Kecamatan Lasalimu (**Desa Lasembangi, Talagabaru, Togomangura, Wagari dan Desa Wasuamba**), Kecamatan Lasalimu Selatan (**Desa Ambuai Indah, Ambuai Togo, Balimu, Harapan Jaya, Kinapani makmur, Mopaano, Mulya Jaya, Rejo Sari, Sangia Arano, Siotapina dan Desa sumber Agung**), Kecamatan Pasarwajo (**Desa Kancinaa, Kaogkeongkoe, Awainulu, Holimombo, Kombeli, Saragi, Wasaga, Waanguangu, Warinta dan Wining**), Kecamatan Siotapina (**Desa Karya Jaya, Kumbewaha, Kuraan dan Desa Manuru**), Kecamatan Wabula (**Desa Bajo Bahari, Koholienombona dan Desa Wasuemba**), dan Kecamatan Wolowa (**Desa Galanti, Kaumbu, Matawia, Wolowa dan Wolowa Baru**).

Prioritas 5 ada 25 Desa yaitu Kecamatan Kapontori (**Desa Boneatiro, Watumotobe, Lambusango, Lambusango Timur, Todanga, Tumada, dan Desa Wakalambe**), Kecamatan Lasalimu (**Desa Bonelalo dan Desa Wasambaa**), Kecamatan Lasalimu (**Desa Benteng, Kamaru, Lawele, Nambo, Sribatara, Suandala dan Waoleona**), Kecamatan Lasalimu Selatan (**Desa Lasalimu dan Siomanuru**), Kecamatan Pasarwajo (**Desa Dongkala, Kabawakole, Pasarwajo, Takimpo, Kondowa, Laburunci, Lapodi dan Desa Mantowu**) dan Kecamatan Siotapina (**Desa Matanauwe**).

Prioritas 6 ada 4 Desa yaitu Kecamatan Lasalimu (**Desa Kakenauwe**), Kecamatan Pasarwajo (**Desa Banabungi, Kambulambulana dan Desa Wakoko**)

Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas.

Prioritas	Range	Jumlah Kel/Desa	Persentase
1	Sangat Rawan	0	0
2	Rawan	3	3,15
3	Agak Rawan	16	16,84
4	Agak Aman	47	49,47
5	Aman	25	26,31
6	Sangat Aman	4	4,21



Gambar 4. Peta Tingkat Kesejahteraan Terendah

3.2. AKSES PENGHUBUNG

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

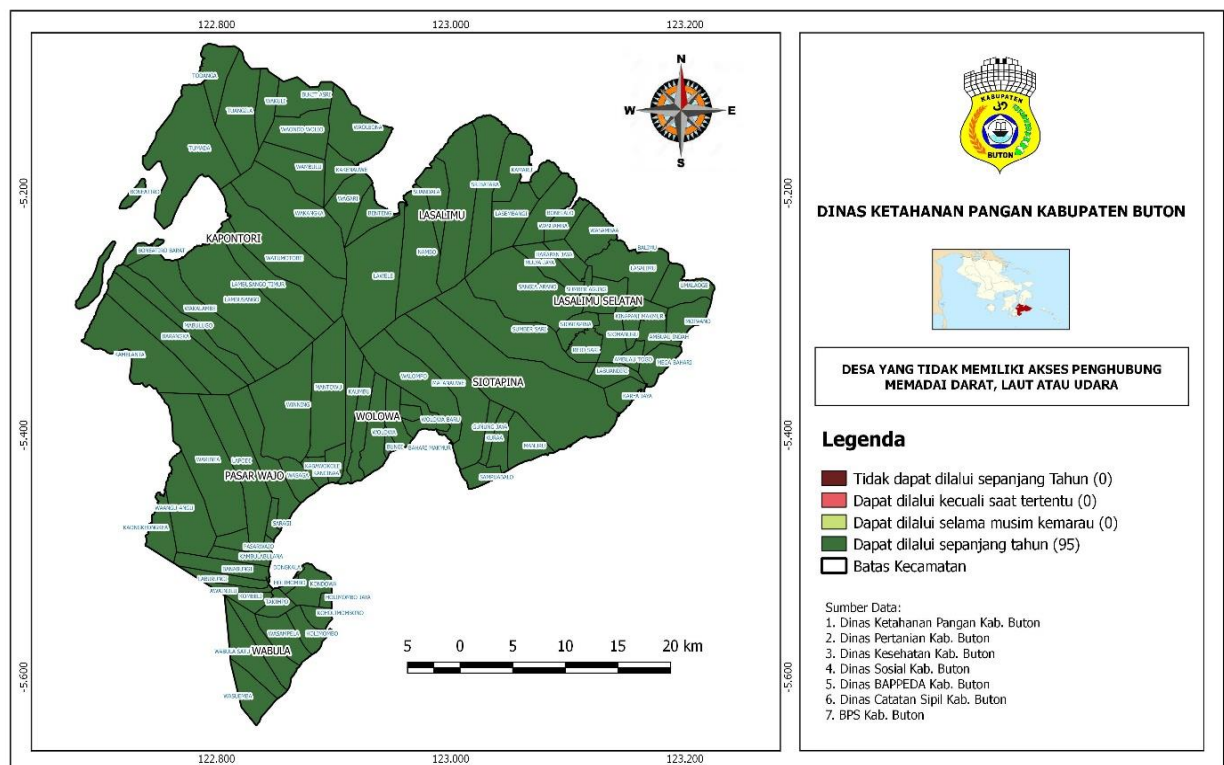
Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian,

peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan. Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2020, BPS, di Kabupaten Buton hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun.

Tabel.4.1. Sebaran desa berdasarkan akses penghubung memadai darat, udara dan air

Prioritas	Range	Jumlah Kel/Desa	Persentase
1	Tidak dapat dilalui sepanjang tahun	0	0
2	Dapat dilalui kecuali saat tertentu	0	0
3	Dapat dilalui kecuali saat musim kemarau	0	0
4	Dapat dilalui sepanjang tahun	95	100



Gambar 5. Peta Akses penghubung

3.3. STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN

Strategi Pemerintah Kabupaten Buton untuk meningkatkan akses pangan yaitu : meningkatkan produktivitas; perluasan lahan sawah; mengurangi dampak iklim-terkait resiko; memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas
 - a. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
 - b. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
 - c. Pengelolaan air
 - d. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
 - e. Menggunakan varietas
2. Perluasan lahan sawah
 - a. Pengembangan lahan sawah
 - b. Optimalisasi penggunaan lahan
 - c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
 - d. Pembangunan sumur pompa dan dam/embung
3. Pengurangan dampak iklim terkait resiko
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen
4. Penguatan kelembagaan bagi petani
 - a. Lembaga Mandiri dan mengakar pada masyarakat
 - b. Pemasaran produk pertanian, dll
5. Penguatan Kapasitas kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) :
 - a. Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
 - b. Pelaksanaan Rembuk Tani desa
 - c. Pelaksanaan kegiatan demplot penyuluha

BAB IV

PEMANFAATAN PANGAN

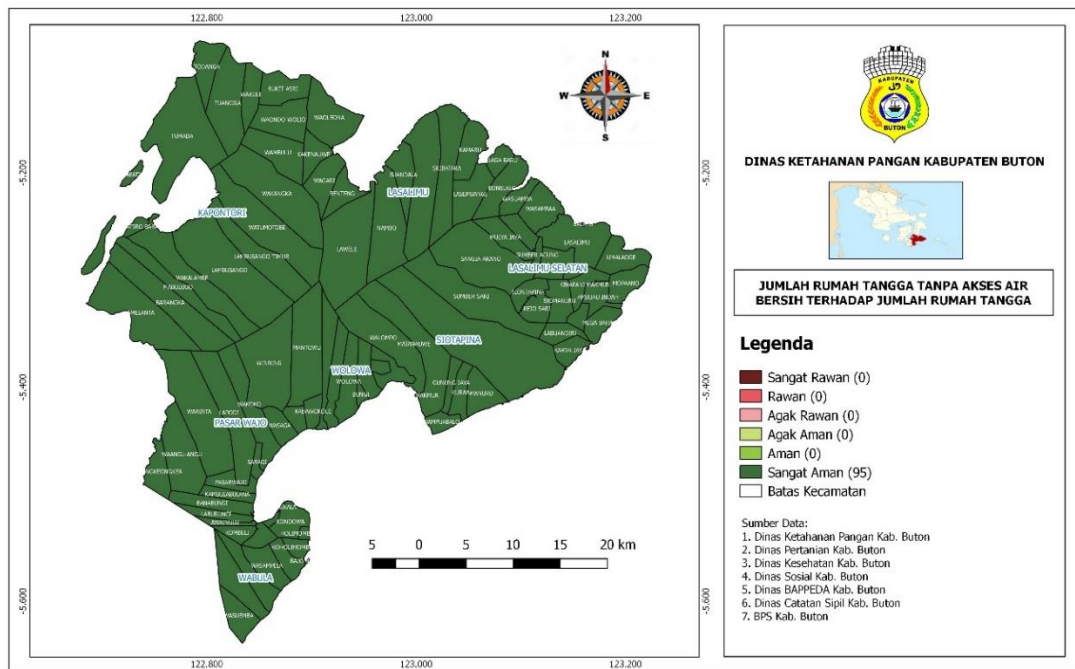
Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1. AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu. Berdasarkan hasil analisis rasio rumah tangga tanpa akses air bersih dari 95 Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Buton semua masuk dalam Prioritas 6 dengan persentase 100% dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.4.1. Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kel/Desa	Persentase
1	Sangat Rawan	0	0
2	Rawan	0	0
3	Agak Rawan	0	0
4	Agak Aman	0	0
5	Aman	0	0
6	Sangat Aman	95	100



Gambar 6. Peta Akses Air Bersih

4.2. AKSES TENAGA KESEHATAN

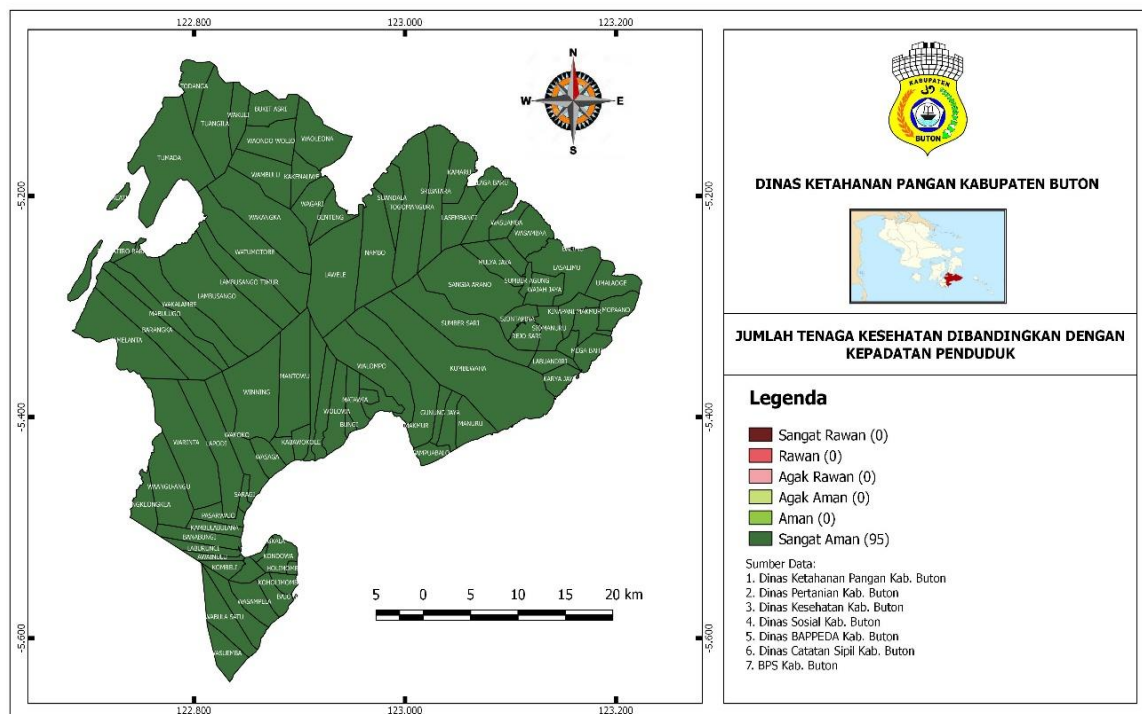
Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis rasio tenaga kesehatan dari 95 Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Buton semua masuk dalam Prioritas 6 dengan persentase 100% dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4.2. Sebaran rasio tenaga kesehatan didesa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kel/Desa	Persentase
1	Sangat Rawan	0	0
2	Rawan	0	0
3	Agak Rawan	0	0
4	Agak Aman	0	0
5	Aman	0	0
6	Sangat Aman	95	100



Gambar 7. Rasio Tenaga Kesehatan

DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);

2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Gizi buruk secara langsung disebabkan karena asupan dan adanya penyakit infeksi. Gizi buruk yang berlangsung lama akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kasus balita gizi buruk adalah balita dengan tanda klinis gizi buruk dan atau indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai Z-Score kurang dari -3 SD.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, jumlah penderita gizi buruk yang ada di Kabupaten Buton pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada (Tabel 4.3). Pada tahun 2023 jumlah penderita gizi buruk sebanyak 40 balita, Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Lasalimu Selatan (16 balita) dan terendah ditemukan di Kecamatan Kapontori (1 balita).

Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk 2019-2023

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kapontori	4	5	13	16	1
2	Lasalimu	6	5	12	28	7
3	Lasalimu Selatan	1	4	15	8	16
4	Siotapina	10	12	27	15	3
5	Wolowa	5	6	4	8	3
6	Pasarwajo	8	10	9	24	7
7	Wabula	0	4	7	11	3
Total		34	46	87	110	40

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Buton



Grafik 6. Penderita Gizi Buruk 2019-2023

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Buton adalah 48 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Buton 6 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Pasarwajo (27 jiwa) dan terendah terdapat di Kecamatan Lasalimu Selatan (0 jiwa). Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan Pasarwajo (3 jiwa) dan terendah di Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan dan Kecamatan Wabula (0 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.4 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan di Kab. Buton Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian	
		Balita	Ibu Saat Melahirkan
1	Kapontori	4	1
2	Lasalimu	4	1
3	Lasalimu Selatan	0	0
4	Siotapina	7	1
5	Wolowa	3	0
6	Pasarwajo	27	3
7	Wabula	3	0
Total		48	6

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Buton



Grafik 7. Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan di Kab. Buton Tahun 2023

4.3. STRATEGI PEMENUHAN PANGAN

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Masalah gizi kronis (*stunting*) masih menjadi persoalan besar di Indonesia, begitu pula di Kabupaten Buton, atau sering disebut adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada dibawah minus dua standar deviasi (-2 SD) anak seusianya. *Stunting* dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan terpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktifitas anak di masa dewasanya.

Kurang gizi pada usia dini, terutama *stunting* dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga

menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menasar kelompok prioritas dilokasi prioritas, merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak, serta pencegahan stunting.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi yang bersifat multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
 - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya dirawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani), sayur dan

buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi *stunting* pada balita juga cukup tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan). Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut bersifat multisektor.
 - a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - ❖ Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (*sprinkle*) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - ❖ Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - ❖ Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - ❖ Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - ❖ Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Kementerian Kesehatan.
 - ❖ Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
 - b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi. Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi dibidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB V

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab 2, 3 dan 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis komposit dari 6 indikator tersebut, 95 Desa/Kelurahan tersebar di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Buton tidak ada desa/kelurahan yang masuk dalam prioritas 1, 2, 3 dan 4. Sedangkan yang masuk prioritas 5 sebanyak 7 desa/kelurahan dan yang masuk dalam prioritas 6 yaitu sebanyak 88 desa/ kelurahan. maka dapat dikelompokkan Desa/Kelurahan yang masuk prioritas 5 dan prioritas 6 sebagai berikut :

1. Prioritas 5 (Aman Pangan) yaitu terdiri dari Kecamatan Lasalimu Selatan (Desa Megabahari), Kecamatan Siotapina (Desa Bahari Makmur, Desa Manuru dan Desa Sampuabalo), Kecamatan Wabula (Desa Bajo Bahari, Desa Holimombo dan Desa Wabula satu).
2. Prioritas 6 (Sangat Aman Pangan) yaitu terdiri :
 - Kecamatan Kapontori ada 17 desa (semua desa masuk dalam prioritas 6)
 - Kecamatan Lasalimu ada 15 desa (semua desa masuk dalam prioritas 6)
 - Kecamatan Lasalimu Selatan hanya ada 16 desa yang masuk dalam prioritas 6.
 - Kecamatan Pasarwajo ada 22 desa (semua desa masuk dalam prioritas 6)
 - Kecamatan Siotapina ada 8 desa yang masuk dalam prioritas 6.

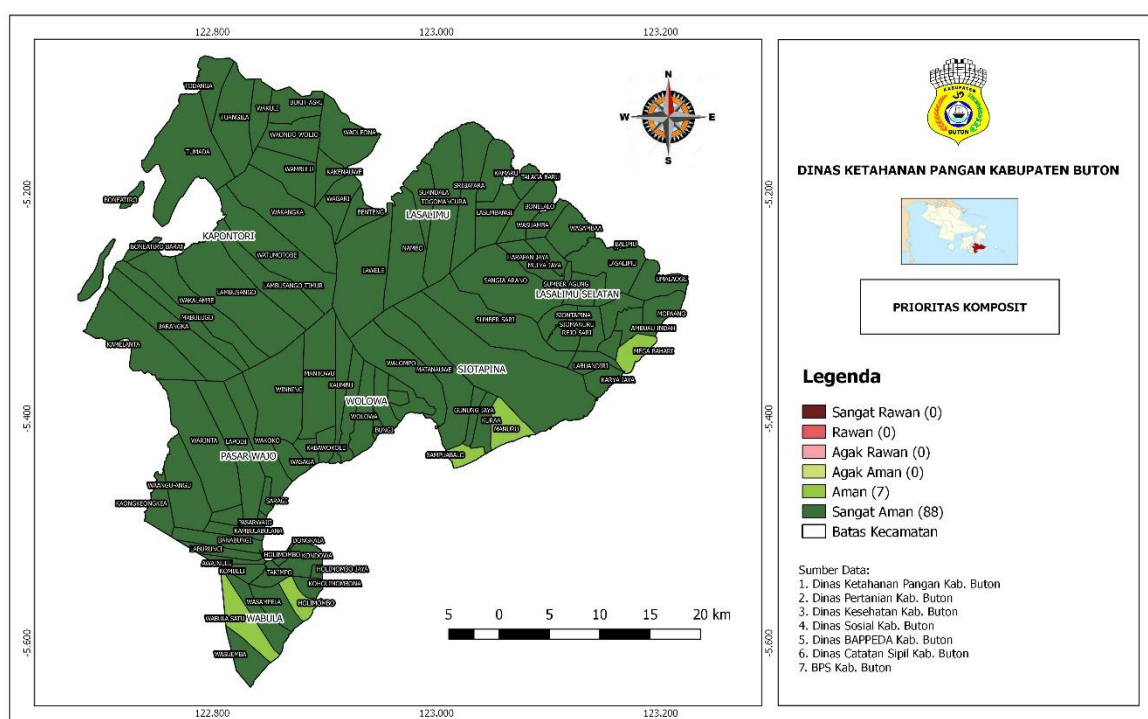
Kecamatan Wabula ada 4 desa yang masuk dalam prioritas 6.

Kecamatan Wolowa ada 4 desa yang masuk dalam prioritas 6.

Adapun Jumlah desa berdasarkan prioritas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kel/Desa	Persentase
1	Sangat Rawan	0	0
2	Rawan	0	0
3	Agak Rawan	0	0
4	Agak Aman	0	0
5	Aman	7	7,36
6	Sangat Aman	88	92,63



Gambar 8. Peta Prioritas Komposit

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Berdasarkan hasil analisis komposit Kabupaten Buton tidak berada di wilayah dengan kategori rentan rawan pangan, namun secara umum kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan berturut-turut disebabkan oleh :

1. Luas lahan pertanian yang semakin kecil
2. Sarana dan Prasarana pangan yang belum memadai dan
3. Banyak nya jumlah penduduk yang belum sejahtera

BAB VII

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Berdasarkan hasil analisis komposit terhadap 6 indikator kerentanan pangan di Kabupaten Buton tidak ditemukan wilayah rentan rawan pangan maka fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kelurahan/desa diprioritaskan pada hasil analisis individu masing-masing indikator yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan di bawah ini.



Gambar 9. Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

Strategi peningkatan ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan jalur ganda (twin track approachers) yaitu :

1. Pendekatan jangka pendek : membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Pendekatan jangka menengah dan jangka panjang : upaya dalam pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pendekatan pemberdayaan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan.
- f. Optimalisasi dalam peningkatan ketersediaan pangan bagi masyarakat
- g. Optimalisasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
- h. Mendorong Pengembangan dan pemanfaatan sarana transportasi terpadu ditingkat wilayah.
- i. Intervensi Kesehatan ibu dan anak harus difokuskan pada anak balita dan ibu hamil.

